

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2013 - 2015

NIA KURNIATI

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

Email : kurniawidiku@yahoo.com

ABSTRACT

This study aimed to analyze the financial performance of local Governments Mataram City used financial ratio analysis, consist of liquidity ratio, Solvability ratio and Activity Ratio. This Type of Research is a descriptive quantitative research. The data used in this research is secondary data in form of local Government Finance report Mataram city in 2013 – 2015 were obtained using the documentation techniques. Method of analysis using financial ratio. The result of this research is showed that financial performance of Mataram city is always raising every year and total debt can be less. The used of financial of Local Government was appropriate to target. Local Government of Mataram City as long 3 (three) year got WTP appraisal from BPK.

Keywords : Liquidity Ratio, Solvability ratio, Activity Ratio

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah sebagai subsistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004), salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan diantaranya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah. Faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pembentukan modal, dan teknologi.

Pengelolaan pemerintah daerah baik ditingkat propinsi maupun kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan adanya otonomi daerah, daerah berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga di daerahnya sendiri. Setiap daerah memiliki Pemerintahan daerahnya sendiri yang menjalankan kewenangannya sendiri yang tidak dapat diganggu oleh daerah lain, begitu pula dengan pengelolaan keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sebagai revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proposional.

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau orang tidak hanya berlaku pada lembaga atau orang yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau orang non komersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Kota Mataram yang merupakan salah satu kota yang berkembang, mendapatkan penilaian laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun 2013 mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan pada tahun 2014 dan 2015 mendapatkan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selama 3 (tiga) tahun terakhir tersebut, Kota Mataram juga banyak mengalami kemajuan dalam hal pembangunan, tingkat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang terkait dengan analisis kinerja keuangan di daerah setempat dengan judul “ **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2013 – 2015**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Mataram Periode 2013 - 2015 berdasarkan analisis rasio keuangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2013 – 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

1. Secara teoritis, untuk menambah khasanah pengetahuan dan menjadi sumber informasi guna melakukan penelitian lebih lanjut dari perspektif yang berbeda khususnya dalam mengembangkan konsep ilmu manajemen keuangan daerah.
2. Diharapkan menjadi tolok ukur dan bahan pertimbangan dalam pengambil keputusan terkait dengan keuangan daerah.
3. Memberikan informasi kepada publik terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hony Adhiantoko (2013) dengan judul penelitian "*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011)*". Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan rumus rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sangat kurang, karena rata-ratanya sebesar 6,57%, (2) rasio kemandirian keuangan daerah pola hubungannya masih tergolong dalam pola instruktif karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 7,17%, (3) rasio efektivitas PAD dikategorikan sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 108,71%, (4) rasio efisiensi keuangan daerah dapat dikatakan kurang efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blora sebesar 99,61%, (5) Rasio keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi yaitu 84,55% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 12,99% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

MHD Karya Satya Azhar (2008) dengan judul penelitian "*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah*". Sampel penelitian pada Pemerintah Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara dan metode statistic untuk sample yang dipasangkan (Paired T-Test). Hasil penelitian secara umum menunjukkan keberadaan perbedaan-perbedaan penting dalam pencapaian kinerja keuangan sebelum dan setelah otonomi daerah. Kinerja keuangan yang diukur lewat desentralisasi fiskal, upaya fiskal dan tingkat kemampuan pembiayaan memiliki perbedaan-perbedaan. Namun, untuk tingkat efisiensi penggunaan anggaran tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

Joko Pramono (2014) dengan judul penelitian "*Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Surakarta)*". Hasil analisis data menunjukkan bahwa kinerja Pemkot Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian, karena rasio kemandiriannya sebesar 15,83% (2010) dan 22,44% (2011), sedangkan rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011). Rasio belanja modal terhadap APBD sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Tingkat Efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif. Pertumbuhan PAD cukup tinggi yakni sebesar 58,93%, pendapatan naik sebesar 19,92%. Belanja operasi naik 14,58% dan belanja modal naik 61,03%. Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi karena rasio DSCR sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011).

Anim Rahmayati (2016) dengan judul penelitian "*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*". Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) rasio kemandirian Pemerintah Daerah Sukoharjo di bawah 25% yakni sebesar 15,31% hal ini berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah, (2) Efektivitas pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengelola PAD mengalami peningkatan dari 107,71% tahun 2011 menjadi 116,44% pada tahun 2012. Walaupun pada tahun 2013 mengalami penurunan yakni sebesar 113,20% tetapi masih termasuk kriteria efektif, (3) Pemerintah Sukoharjo sangat efisien dalam mengelola PAD, hal tersebut dilihat dari rasio efisiensi sebesar 3,71% pada tahun 2011, 2,60% tahun 2012 dan 2,65% pada tahun 2013, (4) Jumlah PAD mengalami pertumbuhan yang sangat positif signifikan pada tahun 2012 sebesar 71,53%, walaupun pada tahun 2013 turun drastis menjadi 16,98%. Begitu juga dengan jumlah pendapatan pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 19,90% kemudian turun menjadi 12,17%. (5) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah(Nia Kurniati)

kemampuan di dalam membayar kembali pinjaman, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio DSCR yang rata-rata di atas 2,5.

2.2 Landasan Teori

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan pengertian kinerja sebagai berikut, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dari berbagai pengertian tersebut, kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan. Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan adalah suatu proses yang mengolah *input* menjadi *output* (hasil kerja).

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah :

- a) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
- b) Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang, sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
- c) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai kesesuaian tujuan.
- d) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Pengukuran kinerja juga memiliki beberapa manfaat, antara lain :

- a) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaikinya.
- d) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2008) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian, *debt service coverage ratio*, dan pertumbuhan, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pengelolaan PAD, serta rasio belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap APBD.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah(Nia Kurniati)

kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo, 2010)

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan (Ibnu Syamsi, 1986 : 199).

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Kinerja yang baik bagi pemerintah daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh pemerintah daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Ibnu Syamsi, 1986 : 99), yakni :

1. Kemampuan struktural organisasinya
Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggungjawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggungjawab yang cukup jelas.
2. Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah
Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan oleh daerah.
3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat
Pemerintah daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.
4. Kemampuan keuangan daerah
Pemerintah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tujuan pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut (Abdul Halim 2007 : 230) :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerahnya.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator kinerja keuangan daerah meliputi :

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah(Nia Kurniati)

1. Indikator masukan (input)
Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pebagai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang sudah ada dan jumlah waktu yang digunakan.
2. Indikator proses
Indikator proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya : ketaatan kepada peraturan perundang-undangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
3. Indikator keluaran (output)
Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya : jumlah produk dan jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
4. Indikator hasil (outcome)
Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya : tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawainya.
5. Indikator manfaat (benefits)
Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya : tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.
6. Indikator dampak (impact)
Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya : peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :
 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. LRA menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah pusat/daerah dalam satu periode laporan.
 2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan satu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
 3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
CALK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, neraca dan laporan arus kas. CALK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Analisis Rasio keuangan berperan penting dalam interpretasi data keuangan dan operasi entitas. Karena itu, banyak analisis yang memanfaatkan rasio keuangan untuk membantu melakukan kegiatan analisis dan interpretasi laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan sebagai alat analisis dapat membantu pihak pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang rasional dan sesuai dengan tujuan entitas karena analisis rasio dapat membantu dalam mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan entitas. Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah (Nia Kurniati)

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan Pemerintah Daerah adalah :

1. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

Dengan demikian setiap Pemerintah daerah untuk mengukur kinerja keuangan daerahnya menggunakan beberapa rasio diantaranya :

1. Rasio Likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dengan menggunakan persamaan :

$$\text{Rasio Likuiditas} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

2. Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya, dimana jenis rasio solvabilitas yang digunakan Kota Mataram adalah rasio total hutang terhadap ekuitas dan rasio hutang terhadap total aktiva, dengan menggunakan persamaan :

$$\text{Rasio Hutang terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Kewajiban}}{\text{Ekuitas}}$$

$$\text{Rasio Hutang terhadap total Aktiva} = \frac{\text{Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}}$$

3. Rasio Aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah, dimana jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk Kota Mataram berupa rasio perputaran aktiva tetap dan rasio perputaran total aktiva, dengan persamaan :

$$\text{Rasio perputaran aktiva tetap} = \frac{\text{PAD}}{\text{Aktiva Tetap}}$$

$$\text{Rasio perputaran total aktiva} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Aktiva}}$$

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dikeluarkan daerah, dengan persamaan :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}}$$

5. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD
Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Apabila pendapatan yang diperoleh lebih dari belanja yang dikeluarkan maka dikatakan belum efisien. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

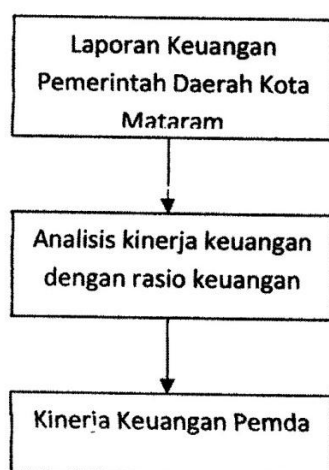
6. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio Aktivitas ini juga disebut sebagai rasio belanja rutin terhadap APBD.

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

2.3 Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas konsep penelitian, maka peneliti membuat konsep pemikiran sebagai berikut :



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini akan menggambarkan karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini akan dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut (Sugiyono, 2008:47).

3.2 Populasi dan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram tahun 2013, 2014 dan 2015.

3.3 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Kota Mataram.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah(Nia Kurniati)

1. Metode dokumentasi yaitu pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data laporan keuangan yang didapatkan dari Bagian Keuangan Pemerintah Kota Mataram.
2. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari landasan-landasan teori dalam berbagai literatur dan tulisan-tulisan yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

3.4 Obyek Dan Lokasi Penelitian

Obyek penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015 dan lokasi penelitian ini adalah wilayah Kota Mataram, khususnya di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Mataram.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis berupa rasio keuangan sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dengan menggunakan persamaan :

$$\text{Rasio Likuiditas} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

2. Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya, dimana jenis rasio solvabilitas yang digunakan Kota Mataram adalah rasio total hutang terhadap ekuitas dan rasio hutang terhadap total aktiva, dengan menggunakan persamaan :

$$\text{Rasio Hutang terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Kewajiban}}{\text{Ekuitas}}$$

$$\text{Rasio Hutang terhadap total Aktiva} = \frac{\text{Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}}$$

3. Rasio Aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah, dimana jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk Kota Mataram berupa rasio perputaran aktiva tetap dan rasio perputaran total aktiva, dengan persamaan :

$$\text{Rasio perputaran aktiva tetap} = \frac{\text{PAD}}{\text{Aktiva Tetap}}$$

$$\text{Rasio perputaran total aktiva} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Aktiva}}$$

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Likuiditas

Hasil perhitungan rasio likuiditas Pemerintah Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Rasio Likuiditas (rasio lancar) Kota Mataram 2013 – 2015

Uraian	2013	2014	2015
Aset Lancar	167,222	149,657	139,080
Kewajiban Lancar	14,852	40,682	47,820
Rasio Lancar	11,26	3,68	2,91

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa rerata kemampuan Pemerintah Kota Mataram dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada tahun 2013 sebesar 11,26, pada tahun 2014 yakni sebesar 3,68. Sedangkan pada tahun 2015 mengalai peningkatan yakni sebesar 2,91. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mataram memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

2. Rasio Solvabilitas

Hasil perhitungan rasio Solvabilitas yang digunakan Pemerintah Kota Mataram adalah rasio total hutang terhadap ekuitas dan rasio hutang terhadap total aktiva, dan hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Rasio Hutang terhadap Ekuitas Kota Mataram 2013 – 2015

Uraian	2013	2014	2015
Kewajiban	14,875	40,687	47,867
Ekuitas	2.593,008	2.763,222	2.097,521
Total Debt To Equity Ratio	0,005	0,015	0,02

Tabel 4.3 Rasio Hutang terhadap Total Aktiva Kota Mataram 2013 – 2015

Uraian	2013	2014	2015
Kewajiban	14,875	40,687	47,867
Aktiva	2.607,883	2.803,909	2.145,388
Debt To Total AssetRatio	0,005	0,015	0,002

Berdasarkan tabel 4.2 dan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa kemampuan Pemerintah Kota Mataram dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya pada tahun 2015 mengalami peningkatan, dan data tersebut juga terlihat bahwa kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mataram mengalami penurunan.

3. Rasio Aktivitas

Perhitungan rasio Aktivitas Pemerintah Kota Mataram menggunakan perputaran aktiva tetap dan perputaran total aktiva dan hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kota Mataram 2013 – 2015

Uraian	2013	2014	2015
PAD	37.491.833.771,00	81.833.670.554,00	103.763.997.826,00
Aktiva Tetap	2.060.180.000,00	2.266.160.000,00	1.619.205.000,00
Rasio Perputaran Aktiva Tetap	18,19	36,11	64,08

Tabel 4.5 Rasio Perputaran Total Aktiva Kota Mataram 2013 – 2015

Uraian	2013	2014	2015
PAD	37.491.833.771,00	81.833.670.554,00	103.763.997.826,00
Total Aktiva	2.607.883.000,00	2.803.909.000,00	2.145.388.000,00
Rasio Perputaran Total Aktiva	14,37	29,18	48,37

Berdasarkan tabel 4.4 dan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa tingkat aktivitas Pemerintah Kota Mataram terhadap kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah mengalami peningkatan, hal ini juga dapat terlihat dari pembangunan yang hampir merata di seluruh Kota Mataram.

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dan kinerja kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah kota. Keberhasilan Pemerintah Kota Mataram dalam mengelola keuangan daerah, dapat dilihat dari opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Kota Mataram yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 4.6 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2013 – 2015

Tahun	Opini BPK
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kemampuan pemerintah daerah Kota Mataram dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya mengalami peningkatan di tahun 2015.
2. Kemampuan pemerintah daerah Kota Mataram dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya mengalami peningkatan, dan nilai kewajiban jangka panjang yang harus dipenuhi mengalami penurunan.
3. Tingkat aktivitas kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah mengalami peningkatan, hal ini juga dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan mengalami peningkatan setiap tahunnya.
4. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, yakni tahun 2013 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah Kota Mataram adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

5.2 Saran

Sebagai Kota yang berkembang, Pemerintah Kota Mataram diharapkan untuk meningkatkan pembangunan secara lebih merata, dimana dengan adanya hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota Mataram di segala bidang.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2007). *Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah*. Jakarta.
- _____. (2011). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2011-2015*. Mataram
- _____. (2003). *Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- _____. (2004). *Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta.
- _____. (2004). *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- _____. (2004). *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- _____. (2004). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah*. Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011), *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Adhiantoko, Hony. (2013), *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011)*. Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta.
- Arsa, I Ketut. (2015). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 s.d. 2013*. Universitas Udayana. Denpasar.
- Azhar, MHD Karya Satya. (2008). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Halim, Abdul. (2012). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta.
- Insukindro, Mardiasmo, Widayat, W., Jaya, W.K., Purwanto, B.M., Halim, A., Suprianto, J., Purnomo, A.B., 1994, *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD*, Buku I, KKD FE UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2006). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Serial Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Pramono, Joko. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*. STIE AMA : Salatiga.
- Rahmayati, Anim. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Surakarta